

1. berita program KB nasional melalui media cetak dan media elektronik, temu kerja petugas advokasi KIE
2. Pelayanan program KB nasional dengan cara meningkatkan operasional tim jaga mutu provinsi, peningkatan operasional pengembangan program KB, peningkatan operasional mobil pelayanan KB (MUYAN), pembinaan dan pematapan peserta KB aktif dengan cara melakukan monitoring dan pembinaan terpadu bersama LSM.
3. Pembinaan dan pematapan peserta KB aktif dengan cara mengadakan kegiatan pemilihan akseptor lestari teladan, pertemuan KB lestari

Beberapa program KB yang sudah dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah adalah dengan memberikan pelayanan KB gratis terutama KB IUD, misalnya pelayanan KB gratis khususnya IUD kepada siapa saja yang ingin menggunakan kontrasepsi tersebut serta melakukan pelatihan pada provider untuk meningkatkan kemampuan teknis petugas dalam melakukan pemasangan/pencabutan IUD.⁷, serta pelayanan KB gratis kepada masyarakat umum pada momen-momen strategis, misalnya kegiatan TNI Manunggal gratis, ulang tahun kepolisian/bayangkara, Hari Jadi Kota Semarang, Hari Keluarga Nasional, Hari Kemerdekaan, Hari Ibu.²

Dengan adanya dukungan kebijakan program KB dari pemerintah pusat yang pelaksanaannya diteruskan sampai ke tingkat provinsi dan kota, serta dengan melakukan studi pendahuluan yang dilakukan penulis melalui wawancara dan observasi yang dimulai pada bulan Februari 2010 terhadap 13 orang yang terkait dengan program KB di kota Semarang, yang terdiri dari unsur petugas BKKBN Kota Semarang yang berganti nama menjadi Badan Pemberdayaan Wanita dan KB (Bapermas dan KB), petugas PLKB, petugas PPKBD dan SDK dan akseptor kontrasepsi IUD di wilayah kecamatan Pedurungan, kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Badan Pemberayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai program KB di kecamatan Pedurungan dengan melakukan pertemuan setiap satu bulan sekali (tanggal 6 atau tanggal 7) membahas tentang agenda kerja, kegiatan dan evaluasi kegiatan yang

sudah berjalan. Pertemuan-pertemuan khusus dilakukan sewaktu-waktu (bila diperlukan). Evaluasi kegiatan ini dilakukan disesuaikan dengan anggaran yang ada yang sudah dianggarkan melalui APBN dan APBD.

2. Dari 6 orang petugas pelaksana PLKB (Petugas Lapangan KB), PPKBD (Petugas Penyuluhan KB Desa), dan SKD (Sub Klinik Desa) di kecamatan Pedurungan mengatakan bahwa berbagai cara telah dilakukan untuk menarik minat PUS untuk bersedia menggunakan kontrsepsi IUD. Cara yang dilakukan, antara lain dengan cara selalu mengingatkan melalui telepon atau bahkan mendatangi klinik BPS dan posyandu untuk memberikan informasi tentang IUD gratis bagi siapa saja yang membutuhkan. Namun, hal ini masih belum cukup membantu memperlancar program KB pemerintah yaitu anjuran menggunakan kontrasepsi MKJP yang efektif dan efisien.

Evaluasi di tingkat kecamatan antara PLKB, PPKBD, SKD, bidan serta warga masyarakat yang ditunjuk oleh kelurahan dilakukan melalui pertemuan rutin setiap satu bulan sekali (minggu pertama atau minggu